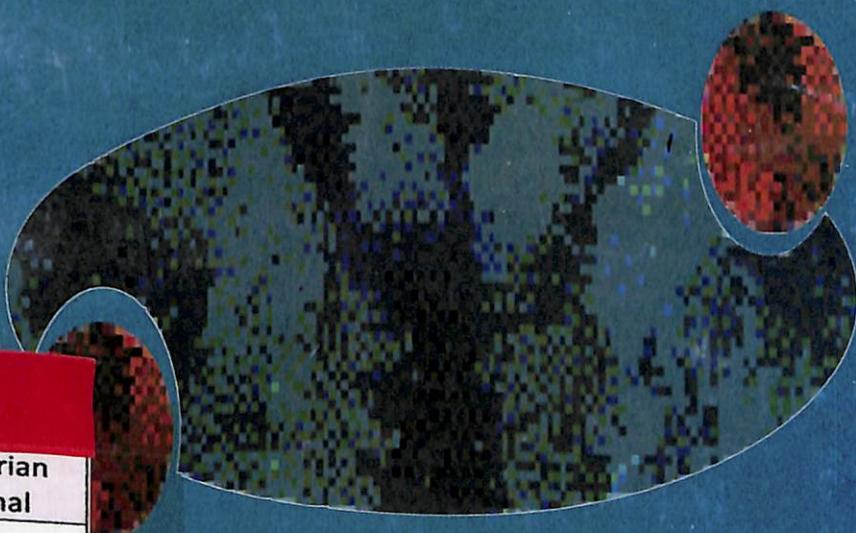


CORAK DAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN

Studi Kasus di Dusun Lae Ikan Desa Jontor,
Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil
Propinsi Daerah Istimewa Aceh



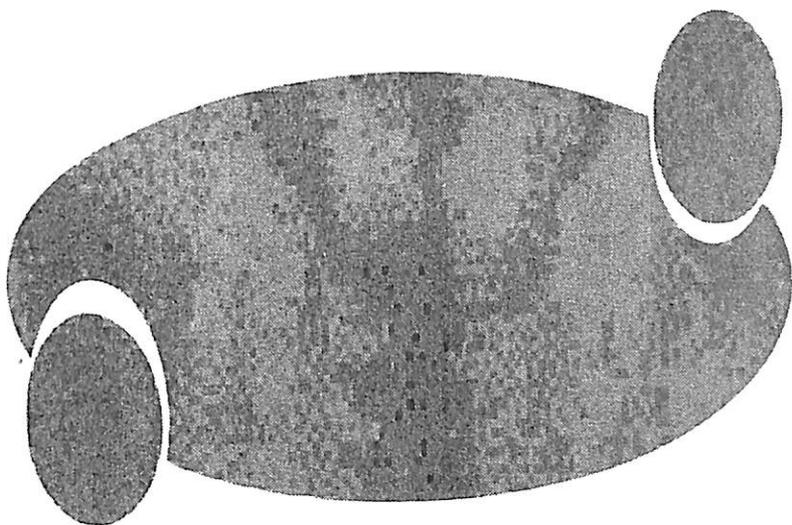
Kelestarian
n Beradisional
Nil
36
SH
C

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH

360.
COR.

CORAK DAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN

**(Studi Kasus di Dusun Lae Ikan, Desa Jontor, Kecamatan Simpang
Kiri Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Daerah Istimewa Aceh)**



**Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

**CORAK DAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN**

**(Studi Kasus di Dusun Lae Ikan, Desa Jontor, Kecamatan Simpang
Kiri Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Daerah Istimewa Aceh)**

Disusun Oleh :

**Shabri A.
Agus Budi Wibowo
Irina Dewi Wanti
Irvan Setiawan
Titit Lestari**

**Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh
2002**

Hak Cipta 2002, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama,

Penulis :

Shabri A.

Agus Budi Wibowo

Irini Dewi Wanti

Irvan Setiawan

Titit Lestari

Konsultan:

T. Thaifur Alhamdany

Editor :

M. Hakim Nyak Pha

Corak dan Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Dusun Lae Ikan Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Daerah Istimewa Aceh)

ISBN: 979-9164-14-1

Hak Penerbitan pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Setting/Layout : Agus Budi Wibowo

Desain Sampul : Agus Budi Wibowo

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh 23123

Telp. (0651) 23226 – 24216

Faks. (0651) 24216

SAMBUTAN

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Indonesia terdiri dari beribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan suku. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas baik dari segi adat, kebudayaan, dan latar belakang sejarah yang berbeda, namun mempunyai satu visi yang sama, yaitu mengembangkan kebudayaan masing-masing dengan tanpa merubah ciri khas budaya itu sendiri. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena dari sanalah akar tradisi dapat digali untuk tetap menumbuhkembangkan pola tingkah laku beradab dan berbagai kebijaksanaan yang berhubungan dengan moral dan etika bangsa.

Bertitik tolak dari kondisi ini, penerbitan buku "Corak dan Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Dusun Lae Ikan Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil)" karya tim penulis dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh perlu mendapat sambutan hangat. Buku ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk dapat mengenalkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipahami oleh generasi sekarang dan generasi mendatang, bahwa bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki nilai-nilai budaya yang banyak dalam membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pada akhirnya diharapkan juga dapat menghilangkan sikap etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat yang majemuk serta memperkuat ketahanan persatuan dan kesatuan bangsa. Penulisan buku ini tentu saja didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu, kami turut mengucapkan terima kasih, semoga kekurangan yang mungkin ada pada buku ini dapat dipahami sebagai suatu motivasi untuk kemajuan di masa yang akan datang, karena "tiada gading yang tidak retak". Kepada penulis saya ucapkan terima kasih dan terus berkarya.

Jakarta, Juni 2002



DR. I.G.N Anom
NIP 130353848

SAMBUTAN

Kepala Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

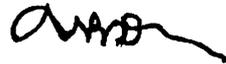
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah dengan kondisi multietnik. Keanekaragaman tersebut merupakan sebuah kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa itu memiliki sistem dan nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka dari suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu, antarkelompok, dengan kondisi alam sekitarnya. Perbedaan tersebut apabila tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun sebaliknya apabila dikelola dengan baik, akan menjadi salah satu perekat bangsa. Beranjak dari kondisi tersebut, perlu diupayakan pembinaan, pengkajian dan penelitian sejarah dan budaya setiap suku bangsa. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penghayatan sejarah dan pengamalan budaya bangsa.

Karenanya, saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya buku "Corak dan Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Dusun Lae Ikan Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil)", kegiatan Balai

Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Tentu saja, hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Harapan saya bahwa buku ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan guna memperluas cakrawala pembaca serta bahan penelitian lebih lanjut. Selain itu, dengan hadirnya buku semacam ini, masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh khususnya, dapat saling memahami sejarah dan budaya yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, akan dapat memahami dan mengerti tentang berbagai budaya yang melandasi persatuan dan kesatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan dan penyelesaian buku ini.

Jakarta, Juni 2002



DR. Abdurrahman
NIP 150110387

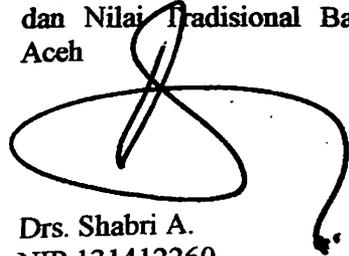
PENGANTAR

Buku berjudul “Corak dan Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Dusun Lae Ikan Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil)” alhamdulillah sampai di tangan pembaca merupakan hasil penelitian tahun 1999 yang dilakukan oleh peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Buku ini masih menggunakan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekarang telah berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga penamaan masih menggunakan nama lama. Penerbitan buku ini bertujuan untuk menginventarisasi, mendokumentasi, menganalisis serta menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan dan kenilaitradisional yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu, selaku Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, saya menyambut gembira atas terbitnya ini. Saya berharap dengan diterbitkannya buku ini selain untuk menambah khazanah dunia pustaka, juga untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya memahami, menghayati dan mencintai salah satu warisan budaya daerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional khususnya bidang budaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penulis serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penerbitan ini. Selamat bekerja dan teruslah berkarya demi kesempurnaan penerbitan selanjutnya.

Banda Aceh, Juni 2002
Kepala Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Banda
Aceh

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail that ends in a small dot.

Drs. Shabri A.
NIP 131412260.

Daftar Isi

Sambutan.....	iv
Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	9
A. Latar Belakang Daerah	9
B. Latar Belakang Kehidupan Sosial Budaya	15
BAB III GAMBARAN KEBERADAAN SUKU YANG ADA DI PERBATASAN (DUSUN LAE IKAN).....	23
A. Mitos	23
B. Persebaran Penduduk	25
C. Bahasa	25
D. Pola Pemukiman	27
E. Sistem Kekerabatan	29
F. Stratifikasi Sosial	29
BAB IV CORAK DAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI PERBATASAN....	31
A. Proses Adaptasi Manusia dan Lingkungan.....	31

B. Corak Interaksi, Kerja sama dan Konflik	40
C. Analisis	51
BAB V PENUTUP	63
Daftar Pustaka	65

B.1B

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Soeharto (Orde Baru) *lengser keprabon*, kerusuhan demi kerusuhan, dari mulai kerusuhan Banyuwangi, Sambas, Ambon dan sampai di bagian lain wilayah Indonesia terus terjadi, seakan sudah menjadi bagian keseharian dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kerusuhan ini telah banyak memakan korban, baik harta maupun jiwa. Banyak ulasan dan anggapan bahwa kerusuhan ini akibat dari ulah para provokator. Namun demikian, tampaknya penyebab masalah ini bukan hanya sesederhana jawaban ulah para provokator semata, tetapi jauh lebih kompleks.

Salah satu masalah yang dapat mungkin menjadi penyebab lain adalah kondisi keanekaragaman suku dan budaya yang ada di bumi Indonesia. Di satu sisi keanekaragaman ini merupakan suatu rahmat, tetapi ia dapat pula menjadi bagian dari penyebab disintegrasi suatu bangsa. Melihat kenyataan itu, maka perlu pengkajian yang mendalam tentang kondisi-kondisi yang dapat

merespon terjadinya sebuah kerusuhan atau konflik. Salah satu daerah yang menyimpan potensi konflik atau kerusuhan antar suku ini adalah daerah perbatasan.

Daerah perbatasan memang dapat lebih rawan terhadap sebuah konflik antar suku. Banyak faktor yang dapat memincu konflik ini, seperti kecemburuan sosial, perebutan sumber daya, dan sebagainya. Suku bangsa yang ada di suatu daerah perbatasan biasanya mengembangkan atau mendorong perkembangan kebudayaan daerah, yang berfungsi sebagai kerangka acuan bersama. Namun tidak jarang pula perkembangan kebudayaan daerah ini diwarnai, paling tidak didominasi oleh salah satu kebudayaan suku bangsa yang mempunyai jumlah pendukung terbanyak atau karena kebetulan telah mapan perkembangannya dan didukung oleh golongan penduduk yang menguasai sumber-sumber politik, ekonomi, dan sosial. Akan tetapi, tidak jarang juga terjadi pada daerah yang tidak terdapat kebudayaan dominan, maka suku bangsa itu cenderung mengacu kepada kebudayaan masing-masing. Jadi, Suatu hal yang tidak mengherankan apabila terbentuk komuniti suku bangsa yang eksklusif, yang dapat menimbulkan kesenjangan hubungan antarsuku bangsa dan kebudayaan (*cultural gap*). Apabila hal ini terjadi, maka konflik atau kerusuhan tinggal menunggu waktu saja.

Permasalahan seperti diuraikan di atas dapat juga melanda masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Di daerah ini terdapat beberapa suku¹ yang memungkinkan dapat berbenturan, apabila tidak diantisipasi secara dini. Daerah perbatasan yang memungkinkan dapat timbul konflik terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Singkil. Ketiga daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah Propinsi Sumatera Utara.

Daerah Lae Ikan adalah salah satu dari tiga dusun yang ada di Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Di daerah ini lah terdapat pos perbatasan antara Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Sumatera Utara. Di daerah ini tinggal beberapa suku, baik yang berasal dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh maupun Propinsi Sumatera Utara.

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa masalah, yaitu, pertama, bagaimanakah kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan ? Kedua, bagaimanakah proses adaptasi yang dilakukan oleh

¹Suku-suku yang dimaksud adalah suku Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Singkil, Simeulu, dan Tamiang.

masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial ? Ketiga, bagaimanakah corak interaksi kerjasama dan konflik di daerah perbatasan ini ?

Pertanyaan pertama mengarah kepada pemahaman bagaimana kehidupan sosial budaya mereka. Budaya apa yang mereka bangun di daerah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki. Pertanyaan kedua mengarah kepada pemahaman tentang bagaimana mereka beradaptasi terhadap kehidupan di alam sekitar mereka, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sedangkan pertanyaan terakhir mengarah kepada pemahaman dinamika sosial budaya kehidupan masyarakat perbatasan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan melalui pemahaman tentang pola pergaulan antarsuku yang ada di daerah perbatasan. Dengan memahami kondisi pola pergaulan ini diharapkan dapat ditemukeni berbagai prinsip dasar hubungan sosial antarkelompok suku, yang terwujud di dalam sebuah jaringan sosial. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kondisi di daerah perbatasan, jaringan

sosial dapat dipergunakan untuk mengeliminir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesenjangan dan konflik budaya. Langkah-langkah ini dapat dilakukan melalui pengambilan peran dari para pemimpin jaringan sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk, baik pemimpin informal maupun formal. Selanjutnya, dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional.

D. Kerangka Pemikiran

Selain daerah perkotaan, daerah perbatasan merupakan salah satu daerah yang juga menyimpan potensi perbenturan antara beberapa suku karena daerah perbatasan memiliki kondisi yang mana masyarakat merupakan masyarakat majemuk. Dalam kondisi yang demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya masalah kesenjangan budaya (*cultural gab*)² dan pertentangan budaya

²Masalah kesenjangan budaya dapat dikatakan sebagai situasi yang tidak nyaman, yang muncul karena adanya ketidaktahuan para pendukung suatu sistem budaya tertentu mengenai sistem budaya yang mengatur kerja sebuah unsur budaya baru yang telah mereka miliki, yang berasal dari masyarakat yang lain. Dengan kata lain di sini terdapat perbedaan pengetahuan, penafsiran atau persepsi mengenai unsur budaya tertentu tersebut, antara masyarakat asli pemilik unsur tersebut dengan masyarakat penerimanya. Kesenjangan ini tentu akan menimbulkan masalah karena bekerja atau berfungsinya suatu unsur budaya dengan baik dan tepat dalam suatu masyarakat diatur dengan seperangkat aturan, norma, yang bersumber

(*cultural conflict*)³. Kedua masalah ini dapat menjadi masalah di kemudian hari apabila tidak diantisipasi sebelumnya.

Namun kenyataannya, walaupun daerah perbatasan merupakan daerah yang menyimpan berbagai potensi konflik, mereka tetap saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi yang terjadi, di antara warga masyarakat itu membentuk suatu jaringan-jaringan yang memungkinkan mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jaringan-jaringan yang mereka bentuk itu dapat dikatakan sebagai jaringan sosial.⁴

pada nilai-nilai tertentu, yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang lain, yang kesemuanya terkait membentuk sebuah kesatuan yang utuh (Taryati dan Dwi Ratna Nurhajarini, 1999: 6)

³Masalah pertentangan budaya adalah situasi dan kondisi yang dianggap tidak nyaman yang timbul karena adanya unsure-unsur budaya (nilai-nilai, norma, aturan, pengetahuan) yang tidak hanya berbeda, tetapi, juga berlawanan namun keduanya hidup dan diterima oleh warga masyarakat. Situasi semacam ini biasanya ditemui dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan yang sangat cepat. Dalam proses ini sebagian warga masyarakat ada yang segera dapat menerima unsur-unsur budaya baru dan menjadi acuan berperilaku sehari-hari. Sementara di pihak lain masih ada warga masyarakat yang belum dapat menentukan sikapnya menolak unsur-unsur budaya baru tersebut dan segera meninggalkan yang lama atau sebaliknya. Sedangkan warga masyarakat yang lain jelas-jelas menentukan sikap menolak unsur-unsur budaya yang baru tersebut. Dalam masyarakat yang semacam inilah tampak selain kesenjangan budaya juga konflik budaya (Taryati dan Dwi Ratna Nurhajarini, 1999: 8)

⁴ Menurut Barns (1954) dan Bott (1957) jaringan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang dibuat oleh individu di sekitarnya dan berpusat pada dirinya sendiri berdasarkan atas pribadinya. Jaringan sosial

Dari jaringan sosial⁵ ini kita dapat memperoleh berbagai keuntungan atau kegunaan, baik bagi masyarakat awam maupun ilmiah. Salah satunya, menurut Meyer (1961) dan Epstein (1961), dari jaringan sosial kita dapat memperoleh data bagaimana sebenarnya norma-norma dan nilai tersebar di suatu komunitas dan bagaimana suatu proses perubahan yang berasal dari respon anggota komunitas terhadap suatu persebaran norma dan nilai sebenarnya terjadi.

E. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu di Dusun Lae Ikan, Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Daerah

merupakan suatu pengelompokan sejumlah orang, paling sedikit tiga orang, yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan sosial itu. Mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial.

⁵Ada dua macam jaringan sosial, menurut Whitten dan Wolfe (1973), yaitu jaringan sosial yang tidak terbatas dan jaringan sosial terbatas. Pada jenis jaringan sosial yang disebut pertama digunakan untuk menggolongkan sejumlah orang dalam suatu kelompok tanpa menggunakan sesuatu ukuran untuk membatasinya. Sedangkan pada jaringan sosial yang disebut terakhir dibuat berdasarkan ukuran yang dapat dipakai untuk memperlihatkan hubungan-hubungannya dalam jaringan sosial secara menyeluruh. Beberapa ukuran yang dipakai yaitu set pribadi (garis-garis yang dimiliki oleh seseorang), set kategori tertentu, set sistem peranan (garis-garis yang melibatkan sejumlah orang yang ada dalam sistem peranan yang terorganisasi atau yang ada dalam suatu kelompok) dan set lapangan (garis-garis dengan sesuatu isi tertentu, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.)

Tingkat II Aceh Aceh Singkil, Daerah Istimewa Aceh. Yang menjadi pertimbangan daerah ini menjadi daerah penelitian adalah karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang menjadi tapal batas antara Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Sumatera Utara.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat. Jadi, peneliti tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat yang diteliti untuk beberapa lama (2 bulan). Dengan metode penelitian seperti ini diharapkan peneliti dapat mengamati, memahami dan mengerti tentang gejala sosial yang terjadi. Pengamatan terlibat ini akan dilengkapi dengan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan, dalam rangka menggali informasi kepada para informan (kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, pemimpin informal lainnya). Dengan demikian, berbagai informasi tentang masalah yang diteliti dapat diperoleh secara mendalam.

Data dan informasi terkait juga ditelusuri melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebudayaan secara holistik. Artinya, hubungan sosial yang terjadi antara dua warga yang berbeda latar belakang sosial budaya, masing-masing akan menggunakan pedoman kebudayaannya atau kebudayaan umum lokalnya sesuai dengan kondisi, situasi dan arena sosial tempat kegiatan dilakukan.

B.1B
2

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Latar Belakang Daerah

1. Lokasi dan Tata Guna Lahan

Dusun Lae Ikan merupakan salah satu dari tiga dusun di dalam wilayah administratif Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil. Daerah ini merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Propinsi Daerah Sumatera Utara. Dusun Lae Ikan dapat dijangkau melalui kendaraan umum melalui rute Banda Aceh - Tapaktuan, Tapaktuan - Subulussalam, Subulussalam - Lae Ikan atau dapat juga melalui rute Medan - Tapaktuan atau Medan - Aceh Aceh Singkil. Daerah ini terletak di jalan negara Medan - Tapaktuan.

Secara administrasi Dusun Lae Ikan, sebagai daerah penelitian, mempunyai batas-batas wilayah sebelah utara dengan Desa Tanjung Mulia (Kabupaten Dairi, Sumut), sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Jaitun (Desa Jontor), sebelah timur berbatasan dengan hutan (Propinsi Daerah Istimewa Aceh), dan

sebelah barat berbatasan dengan hutan yang masuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Keadaan topografi Desa Jontor berupa daerah perbukitan, demikian halnya dengan Dusun Lae Ikan. Kondisi topografi yang demikian biasanya membentuk suatu pola kehidupan pertanian ladang kering atau perkebunan. Hal ini terjadi juga di daerah Jontor, khususnya Dusun Lae Ikan yang sebagian besar lahan pertaniannya merupakan pertanian lahan kering dan perkebunan. Kondisi lahan yang bergunung-gunung dan dengan kondisi tanah yang subur menyebabkan lahan di daerah ini banyak diusahakan untuk lahan perkebunan. Tanaman yang banyak diusahakan adalah tanaman gambir, nilam, dan padi darat (*Page Ladang*). Selain bercocok tanam di ladang, masyarakat daerah ini juga mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil hutan yang banyak diambil oleh penduduk adalah buah pete, buah jengkol, buah durian, dan rotan.

Penggunaan lahan di Desa Jontor, termasuk Dusun Lae Ikan, yang luasnya 5000 ha meliputi tanah sawah, tanah kering, perumahan dan pekarangan, dan hutan (tabel 1). Luas lahan yang digunakan untuk lahan pertanian kering menduduki persentase yang paling besar. Hal ini disebabkan semua penduduk hampir memiliki lahan pertanian kering yang merupakan milik sendiri. Jika mereka tidak memiliki lahan pertanian, mereka dapat membuka hutan dan

mengusahakannya sendiri menjadi lahan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan mereka hampir semua memiliki lahan pertanian.

Tabel 1
Tata Guna Lahan di Desa Jontor

No.	Tata Guna Lahan	Luas (ha)	Persentase
1.	Perumahan dan Pekarangan	17,0	0,4
2.	Tanah Sawah	920,0	18,4
3.	Tanah Kering	3368,0	67,4
4.	Hutan	522,0	10,4
5.	Lain-lain	173,0	3,4
	Jumlah	5000,0	100,0

Sumber : Mantri Statistik Kec. Simpang Kiri., 1998

Secara geografis, Dusun Lae Ikan terletak pada daerah yang strategis yaitu di pinggir jalan negara Banda Aceh - Medan. Jalan Banda Aceh Medan mempunyai aksesibilitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan daerah ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi pula. Mobilitas yang dimaksud dapat berupa mobilitas barang

maupun mobilitas orang. Hal itu tampak dari lancarnya lalu-lalang kendaraan yang melewati daerah ini setiap harinya.

2. Keadaan Alam

Topografi merupakan gambaran kenampakan permukaan bumi. Salah satu faktor penting dari topografi adalah relief yang merupakan gambaran kenampakan permukaan bumi. Relief permukaan bumi Dusun Lae Ikan cenderung berbukit-bukit. Kondisi topografi yang demikian dan suhu yang relatif agak rendah, maka daerah ini digolongkan ke dalam daerah sejuk.

Secara keseluruhan, Dusun Lae Ikan beriklim tropis dengan curah hujan 800 - 1200 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 25° C sampai 27° C. Daerah ini mempunyai ketinggian sekitar 880 m dari permukaan air laut (dpal) yang merupakan lahan dengan sudut kemiringan (elevasi) yang relatif tajam yang menyebabkan topografi daerah ini berbukit-bukit. Kondisi tanah di daerah ini tergolong subur untuk pertanian lahan kering. Oleh karena itu, wilayah ini cocok dimanfaatkan untuk tanaman lahan kering seperti gambir dan nilam.

Dusun Lae Ikan dibagi menjadi dua oleh sungai besar, yaitu sungai Lae Kombih. Air sungai ini jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya mandi, cuci, dan masak karena letak sungai yang berada teramat dalam di lembah pegunungan. Pada umumnya penduduk daerah bermukim pada daratan tinggi atau pada punggung

pegunungan. Kebutuhan air bersih diperoleh penduduk dari mata air pegunungan yang tak pernah kering dan banyak terdapat di sekitar permukiman. Pengambilan air masih dilakukan dengan menggunakan ember. Biasanya mereka membawa barang-barang yang mau dibersihkan ke sumber mata air. Sedangkan air untuk memasak dibawa ke rumah dengan menggunakan ember. Penggunaan pipa atau saluran air ke rumah penduduk tidak bisa dilakukan karena letak mata air yang umumnya terdapat di bawah permukiman. Kondisi perumahan penduduk daerah penelitian umumnya adalah semi permanen. Bangunan rumah terbuat dari papan kayu dengan lantai tanah atau semen. Fasilitas untuk MCK sebagian besar masih dilakukan di sumber mata air.

3. Sejarah Keberadaan Dusun Lae Ikan

Asal mula keberadaan Dusun Lae Ikan, menurut cerita para informan (sesepuh adat), adalah di daerah ini banyak terdapat ikan. Sebutan Lae Ikan dalam bahasa Indonesia dapat berarti Sungai Ikan. Adapun pemberian nama Lae Ikan disebabkan di daerah ini sangat banyak terdapat ikan *Jurung* atau *Simerah*. Di daerah lain jenis ikan ini dinamakan ikan *Kerling*. Selain ikan *Jurung* atau *Simerah* masih terdapat jenis ikan air tawar yang lainnya. Ikan-ikan tersebut sebenarnya ditangkap dari sungai Lae Kombih yang terletak sangat dekat dengan dusun ini. Jika musim penghujan tiba air sungai Lae Kombih naik dan meluap ke sungai-sungai kecil di sekitar dusun.

Luapan air sungai Lae Kombih juga mengangkut berbagai jenis ikan yang terdapat di dalamnya. Pada saat air sungai mulai surut, maka penduduk tinggal memasang bubu atau jaring dan ikan dapat dengan mudah ditangkap. Karena mudahnya mendapat ikan di dusun ini maka dusun ini, dinamakan Dusun Lae Ikan.

Menurut Kepala desa Jontor, Dusun Lae Ikan baru tumbuh pada sekitar tahun 1940-an. Penduduk yang mula-mula datang ke dusun ini berasal dari Penanggalan dan Runding. Kedatangan penduduk ini disebabkan banyaknya sumber hasil hutan yang terdapat di sekitar dusun ini. Daerah yang dikelilingi oleh hutan banyak menyediakan hasil-hasil hutan yang banyak dimanfaatkan, misalnya buah pete, buah jengkol, buah durian dan rotan. Keadaan ini yang menyebabkan penduduk dari luar ingin mengambil dan memanfaatkan hasil hutan tersebut sehingga mereka memilih pindah ke daerah ini. Kepala dusun waktu itu belum ada sehingga jabatannya masih dirangkap oleh Kepala Desa Jontor yang berkedudukan di Jontor. Desa Jontor dengan Dusun Lae Ikan berjarak lebih kurang 10 km.

Selanjutnya, menurut informan (tokoh masyarakat) pada saat pertama Dusun Lae Ikan dihuni oleh hanya 5 KK. Mereka pindah dari Penanggalan dan Rundeng untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Sebelum Lae Ikan menjadi daerah seperti sekarang, pernah terjadi pergesekan antara warga di

Sumatera Utara dengan warga di Aceh dalam hal penentuan tapal batas. Masyarakat Dairi mengatakan batas wilayah Sumatera Utara adalah sampai pertengahan daerah Kedabuhan (Lae Ikan I, Aceh). Sedangkan menurut orang Subulussalam (Aceh) daerah perbatasan Aceh sampai Lae Ikan II (Sumatera Utara). Sebelum ada Dusun Lae Ikan I (Aceh) dengan Dusun Lae Ikan II (Desa Tanjung Mulia, Sumut) di daerah ini hanya terdapat daerah Lae Ikan yang meliputi kedua wilayah di atas. Untuk mengatasi hal ini, turunlah orang-orang tua masyarakat Penanggalan dan Rundeng termasuk Camat Simpang Kiri untuk mencari kesepakatan. Setelah Bupati KDH Tk. II Aceh Selatan yaitu Bapak Drs. H. Said Mudhahar Ahmad berunding dengan Bupati KDH Tk. II Dairi, maka resmilah batas wilayah seperti keadaan yang sekarang. Peringatan untuk peristiwa ini oleh masyarakat dibangunlah patung Gajah Putih yang terdapat di daerah perbatasan di wilayah Aceh.

B. Latar Belakang Kehidupan Sosial Budaya

1. Kependudukan

Penduduk adalah modal penting dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya penduduk, maka pembangunan tidak dapat berjalan. Dalam subbab II berikut ini akan dijelaskan bagaimana gambaran penduduk daerah penelitian. Aspek-aspek kependudukan yang akan

disajikan meliputi jumlah dan komposisinya, mata pencaharian, dan pendidikan.

Tabel 2

Komposisi Penduduk Dusun Lae Ikan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuam	Jumlah	
			Absolut	Persentase
0 - 15	31	34	65	33,5
16 - 30	30	32	64	33,1
31 - 45	18	21	39	20,1
46 - 60	11	13	24	12,3
60 +	2	1	3	1,0
Jumlah	92	101	193	100,00

Sumber: Monografi Dusun Lae Ikan, Desa Jontor, Kec. Simpang Kiri, Kab. Aceh Singkil, tahun 1999

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Jontor adalah 568 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Dusun Lae Ikan sebanyak 193 jiwa dengan 39 KK. Kompisipi penduduk menurut umur dan

jenis kelamin disajikan dalam tabel 2. Dari tabel 2 di atas tampak bahwa komposisi penduduk laki-laki dengan perempuan lebih banyak penduduk perempuan.

Sebagian besar penduduk Lae Ikan adalah berasal dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Semuanya adalah merupakan WNI asli. Perkembangan jumlah penduduk relatif kecil. Hal ini terlihat dari jumlah KK pada tahun 1940 sebanyak 5 KK dan pada tahun 1999, dalam kurun waktu 59 tahun hanya berkembang menjadi 39 KK. Jadi selama kurun waktu 59 tahun pertambahan penduduk hanya 34 KK. Pertambahan yang sangat kecil semacam ini didorong oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kondisi daerah Lae Ikan yang terletak di pinggir jalan negara membuat masyarakat daerah ini mobilitasnya tinggi. Menurut informan, kebanyakan kaum muda di Desa Lae Ikan pergi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan dan penghidupan baru serta akhirnya menetap di daerah baru tersebut. Perpindahan penduduk dari desa Lae Ikan ke daerah lain ini menyebabkan perkembangan jumlah penduduk Lae Ikan relatif kecil. Faktor ke dua adalah karena pada jaman dahulu daerah Lae Ikan masuk dalam wilayah Kabupaten Dairi, hingga semua penduduk berasal dari daerah Dairi dan setelah masuk ke dalam wilayah Aceh masih enggan pula penduduk Aceh lainnya datang ke tempat ini. Meskipun terletak pada daerah dengan aksesibilitas tinggi, tetapi karena topografi daerahnya yang berbukit-bukit menyebabkan orang enggan datang. Jumlah pendatang di daerah ini hanya 6 orang yang

berasal Jawa dan Aceh. Suku Aceh yang datang dari daerah ini kebanyakan dari Kecamatan Simpang Kiri khususnya dan Kabupaten Aceh Selatan umumnya.

2. Mata Pencaharian

Sebagai daerah pertanian sebagian besar penduduk di Dusun Lae Ikan bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian yang diusahakan oleh penduduk daerah ini adalah pertanian ladang, seperti gambir dan nilam. Dari data lapangan diperoleh data bahwa komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Komposisi Penduduk Dusun Lae Ikan berdasarkan Mata
Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	90	81,8
2.	Pegawai Negeri Sipil	8	7,2
3.	Swasta/wiraswasta	12	11,0
	Jumlah	110	100,0

Sumber : Data Monografi Desa Jontor, 1999.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat daerah penelitian bermatapencaharian sebagai petani dengan jumlah

90 orang atau 81,8 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Kemudian, penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi guru dan aparatur desa serta penjaga pos perbatasan tercatat sebanyak 8 orang atau 7,2 persen, sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta atau sektor swasta sebanyak 12 orang atau 11,0 persen. Menurut informan (kepala dusun) tingginya persentase jumlah petani ini disebabkan lahan pertanian di daerah ini masih luas sehingga penduduk hanya tinggal membuka lahan hutan dan mengolahnya sebagai lahan pertanian. Di samping itu, lahan yang ada mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi dan cocok ditanami tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti nilam.

Sistem pertanian yang diusahakan oleh penduduk daerah ini adalah pertanian lahan kering. Tanaman pertanian lahan kering ini terdiri dari tanaman ladang seperti nilam, gambir, dan padi kering. Selain tanaman tersebut, berdasarkan data dari para informan, penduduk juga memanfaatkan hasil hutan seperti buah pete, buah jengkol, dan buah durian untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil pertanian ini dijual ke luar daerah. Sebagian besar petani di daerah ini adalah petani pemilik, artinya bahwa petani mengerjakan lahan milik mereka sendiri dengan tenaga kerja yang diambil dari anggota keluarga mereka sendiri.

3. Tingkat Pendidikan

Sumberdaya manusia dapat mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Salah satu komponen penentu kualitas sumberdaya manusia adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu penduduk, maka akan semakin maju kondisi daerahnya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan penduduk Dusun Lae Ikan tampak pada tabel 4.

Tabel 4

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	71	58,2
2.	SMP	49	40,1
3.	SMA	12	9,7
	Jumlah	122	100,0

Sumber : Data Monografi Desa Jontor, 1999.

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Dusun Lae Ikan berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 71 orang atau 58,2 persen dari jumlah penduduk yang sekolah, SLTP

Tingkat pendidikan penduduk yang mendiami suatu wilayah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu penduduk berpendidikan rendah, berpendidikan menengah, dan berpendidikan tinggi (Amin Dien, 1974). Penduduk dapat dikatakan berada pada kelompok berpendidikan tinggi jika mereka berpendidikan sampai SMTA sederajat ke atas. Sedangkan penduduk yang berpendidikan sampai SLTP atau sederajat digolongkan dalam kelompok masyarakat berpendidikan menengah, dan penduduk yang berpendidikan tingkat sekolah dasar digolongkan dalam kelompok masyarakat berpendidikan rendah.

Dari fenomena di atas penduduk daerah penelitian yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 71 orang atau 58,2 persen digolongkan dalam masyarakat yang berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk daerah penelitian disebabkan karena rendahnya tingkat taraf hidup masyarakat. Penduduk di dusun Lae Ikan tergolong dalam kelompok masyarakat prasejahtera. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data pengamatan di lapangan bahwa di dusun Lae Ikan terdapat sarana pendidikan berupa SD satu buah, tetapi sebagian besar anak-anak dusun Lae Ikan bersekolah di SD yang berada di Desa Tanjung Mulia, Sumatera Utara. Menurut seorang informan, hal ini disebabkan kualitas sekolah di Desa Tanjung Mulia

lebih bagus dibanding SD di Dusun Lae Ikan Aceh. Pendidikan agama selain diperoleh dari TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) yang ada di *meunasah* setempat juga diperoleh dari *dayah-dayah* modern yang berada di Subulussalam.

B.1B

3

GAMBARAN KEBERADAAN SUKU YANG ADA DI PERBATASAN (DUSUN LAE IKAN)

A. Mitos

Dusun Lae Ikan banyak dihuni oleh masyarakat yang berasal dari suku Batak Fak Fak. Namun demikian, selama tinggal di dusun tersebut telah banyak mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat, yaitu Aceh Singkil. Oleh karena itu, adat istiadat yang dipergunakan di dusun tersebut pada umumnya adalah adat Aceh Singkil, sementara yang tersisa dari tanda kesukuan asal mereka hanya tampak dari penyebutan marga di belakang nama mereka saja.

Nama Lae Ikan, menurut penuturan beberapa informan, berasal dari dua kata, yaitu Lae dan Ikan. "Lae" diartikan sebagai sungai, sedangkan "Ikan" berarti ikan itu sendiri. Sungai yang dimaksud dalam kata "Lae" tadi adalah Sungai Lae Kombeh sekarang, yang membatasi Dusun Lae Ikan dengan wilayah lainnya. Sementara mengenai penamaan Ikan disebabkan dahulunya di wilayah ini pernah hidup sejenis ikan yang amat banyak jumlahnya.

Ikan yang dimaksud dinamakan ikan jurung atau simerah, yang di daerah Aceh lainnya dinamakan ikan kerling. Tidak diketahui siapa yang menamakan dusun Lae Ikan, namun hingga sekarang, ikan yang dimaksud dalam mitos penamaan dusun tersebut sekarang tidak begitu banyak diketemukan lagi keberadaannya.

Selanjutnya, penamaan daerah tersebut menjadi Lae Ikan kemudian disahkan secara administratif sehingga menjadi nama dari dusun tersebut. Nama ini telah juga disahkan oleh masyarakat adat Aceh Singkil yang memang telah diadopsi budayanya. Identitas orang Aceh Singkil terutama diketahui dari perasaan kesukubangsaan mereka. Sebagai satu suku bangsa, mereka mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu dalam adat istiadat, bahasa dan daerah. Orang Aceh Singkil mendiami empat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yaitu Kecamatan Aceh Singkil, Simpang Kiri, Simpang Kanan dan Pulau Banyak. Adat istiadat yang berkembang di kalangan orang Aceh Singkil merupakan hasil asimilasi antara adat Aceh, Minangkabau, Mandailing dan Nias. Pengetahuan mengenai asal usul orang Aceh Singkil diketahui melalui dongeng yang diceritakan secara turun temurun.

Menurut informan, sesepuh adat, perpindahan suku bangsa tadi ke wilayah Aceh Singkil diperkirakan telah terjadi sejak masa kesultanan Aceh, yaitu ketika perdagangan lada dengan dunia luar berkembang pesat. Ketika itu beberapa daerah yang potensial untuk

tanaman lada ditaklukkan. Penaklukan itu mempunyai arti ganda, di samping untuk monopoli perdagangan lada juga untuk mendapatkan tenaga-tenaga buruh yang murah.

B. Persebaran Penduduk

Penduduk pendukung kebudayaan Aceh Singkil tersebar di Kecamatan Aceh Singkil, Simpang kiri, Simpang kanan dan Pulau Banyak. Wilayah Kecamatan Aceh Singkil ini merupakan hamparan hutan yang luas dan lumbung kayu serta berbagai sumber kekayaan alam lainnya. Kecamatan Pulau Banyak mempunyai perikanan yang potensial dengan panorama lautnya yang indah. Penduduk berdiam di pinggir-pinggir jalan dan hutan serta di pinggir-pinggir pantai dan sungai. Lingkungan alam wilayah Aceh Singkil umumnya masih merupakan kawasan hutan. Sebagian besar dari lahan yang ada belum didayagunakan. Pada bagian pantai, ditanah yang berawarawa, dan di sepanjang aliran sungai ditumbuhi oleh pohon nipah dan sagu. Tanah pertanian terdapat di sepanjang aliran sungai itu. Pendayagunaan lahan dengan ukuran relatif luas baru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

C. Bahasa

Walaupun telah terjadi percampuran antara budaya Batak Fak-fak dengan budaya Aceh Singkil, namun hal ini tidak begitu

berpengaruh terhadap bahasa penduduk dusun Lae Ikan. Bahasa pengantar anggota masyarakat di sekitar dusun ini banyak mempergunakan bahasa Indonesia, sebagai bahasa yang dimengerti oleh kedua belah suku. Dengan demikian, penggunaan bahasa daerah mereka masing-masing sebagai bahasa pengantar amat jarang dilakukan. Mereka terkadang menggunakan bahasa ibu (Batak Fak-fak) sebagai bahasa pengantar antar kerabat. Lain halnya dengan bahasa pengantar dalam kegiatan di luar kerabat (dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh/Singkil), mereka banyak tahu dan menggunakan bahasa setempat (Aceh Singkil atau Aceh) untuk memperlancar komunikasi antarindividu.

Meskipun ada perbedaan antara bahasa Batak Fak-fak dengan bahasa Aceh Singkil, namun jika dilihat dari asal mula bahasa Aceh Singkil itu sendiri banyak mendapat pengaruh daerah Minangkabau dan Tapanuli. Bahasa Minangkabau dapat ditemui dalam kosakata bahasa Aceh Singkil, sedangkan bahasa Tapanuli ditemui pada intonasi suara yang keras, tinggi, rendah yang kadang-kadang diselingi dengan kata "bah".

Pemakaian bahasa Aceh Singkil umumnya dipergunakan dalam lingkungan keluarga, mulai dari daerah pantai sampai ke hulu sungai Aceh Singkil. Bahasa Aceh Singkil terdiri dari dialek Aceh Singkil Simping Kiri dan dialek Aceh Singkil Simping Kanan.

Pengaruh bahasa Aneuk Jamee dan bahasa Aceh ditemui juga pada bahasa Aceh Singkil.

D. Pola Pemukiman

Pemukiman penduduk di dusun Lae Ikan, adalah seperti yang telah dikemukakan dalam bab II di atas, yaitu berada di wilayah perbatasan jalan negara Kecamatan Simpang Kiri-Medan. Mengenai konsep kewilayahan nampaknya berbeda dengan suku bangsa Aceh Singkil yang banyak menetap di wilayah pesisir, sepanjang aliran sungai, dan di daerah berbukit-bukit. Areal persawahan umumnya berada di samping perkampungan ataupun di daerah yang agak jauh dari perkampungan mereka. Berbeda halnya dengan suku bangsa Aceh Singkil yang banyak menggunakan sarana transportasi air untuk pergi ke tempat tujuan mereka.

Aspek ketradisionalitas untuk membentuk sebuah pola pemukiman tidak dipergunakan oleh warga dusun Lae Ikan. Hal ini disebabkan rendahnya taraf perekonomian mereka, sementara untuk membangun sebuah rumah tradisional membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, saat ini warga banyak membangun rumah dengan tipe sederhana dan non permanen. Pola ruangnya dibuat menurut kebutuhan mereka, sehingga terkesan tidak mengikuti gaya arsitektur, baik rumah tradisional maupun rumah modern.

Adapun rumah tradisional orang Aceh Singkil biasanya dibangun di atas tiang-tiang kayu sebagai rumah panggung, yang tingginya lebih kurang tiga meter dari permukaan tanah. Arsitektur rumah ini merupakan perpaduan antara rumah pesisir dan rumah daerah hulu sungai. *Sapo* merupakan sebutan bangunan di daerah hulu sungai, sedangkan yang dipesisir dinamakan *rhumah*. Bentuk dasar kedua model bangunan tersebut sebenarnya sama. Bagian dalam merupakan satu ruangan besar tanpa dinding pemisah, untuk membatasi kamar tidur dengan bagian luar biasanya dipakai tirai kain. Perbedaannya hanya pada pada lotengnya, di mana *rhumah* dilengkapi dengan loteng, sedangkan *sapo* tidak ada loteng.

Rumah-rumah tersebut sebagian mengelompok dan sebagian lain letaknya berjauhan. Batas-batas antara rumah yang satu dengan rumah lainnya berupa pohon yang tumbuh sendiri. Tidak adanya pagar pembatas yang jelas kerap kali menimbulkan perselisihan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sedangkan antara satu kampung dengan kampung lainnya hanya ada batas-batas alam.

Pada setiap kampung biasanya terdapat sebuah bangunan surau (*Meunasah*) dan sebuah mesjid. Bangunan surau terutama digunakan oleh kaum wanita, sedangkan mesjid oleh kaum pria sebagai tempat kegiatan yang ada kaitannya dengan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan. Surau juga digunakan sebagai tempat belajar mengaji anak-anak.

E. Sistem Kekeabatan

Garis keturunan warga dusun Lae Ikan adalah sama halnya dengan orang Aceh Singkil, yaitu berdasarkan prinsip patrilineal. Keluarga inti merupakan kelompok kerabat yang terkecil dan berikutnya keluarga luas. Dalam perkawinan mereka menganut prinsip eksogami klen (marga). Klen merupakan kelompok kerabat yang terbentuk sebagai gabungan dari sejumlah keluarga luas.

Untuk tahun-tahun pertama sesudah menikah, pasangan pengantin menetap di lingkungan kerabat istri (*uxorilokal*). Hal ini berkaitan dengan upacara maulid nabi, adat mengharuskan pengantin pria membawa hidangan *jamba* dari rumah mertuanya ke masjid tempat upacara maulid dilangsungkan. Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum shalat Id, pengantin perempuan harus mengunjungi mertuanya.

Setelah kelahiran anak pertama atau sekurang-kurangnya setahun masa perkawinan, keluarga baru ini keluar dari lingkungan rumah tangga keluarga orang tua istri. Mereka membangun rumah dan membina keluarga sendiri, biasanya tempat yang dipilih berdekatan dengan rumah orang tua pihak suami.

F. Stratifikasi Sosial

Pada masa lalu, keturunan raja merupakan golongan elite sosial terpendang. Para alim ulama sangat dihormati di kalangan

masyarakat, mereka sering diminta fatwanya apabila ada persoalan yang menyangkut keagamaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dewasa ini yang tergolong elite sosial di Aceh Singkil (termasuk di Dusun Lae Ikan) adalah ahli adat, golongan ulama dan orang kaya.

Ninik mamak merupakan suatu lembaga dalam struktur organisasi politik tradisional orang Aceh Singkil. Lembaga ini selain berfungsi dalam bidang adat juga dalam menyelesaikan masalah-masalah mengenai pemerintahan kampung. *Ninik mamak* terdiri dari orang-orang tua atau yang dituakan seperti kepala *mukim*, *keuchik*, pemuka adat, khatib, imam dan bilal.

BAB

4

CORAK DAN POLA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN

A. Proses Adaptasi Manusia dan Lingkungan

1. Adaptasi Manusia dengan Lingkungan Alam

Tidak dapat dimungkiri bahwa manusia harus beradaptasi dengan lingkungan alamnya, yang mana telah pula dilakukan oleh warga Dusun Lae Ikan. Nama dusun tersebut secara tidak langsung menunjukkan kedekatannya dengan lingkungan alamnya yang memiliki kandungan air tanah yang melimpah, yakni dengan dipergunakannya kata *Lae* yang berarti sungai. Sementara itu, kata *Ikan* adalah disebabkan pada saat itu (menurut warga dusun) masih banyak ditemukan ikan yang menghuni di sungai Lae Kombeh (masih wilayah Dusun Lae Ikan). Adapun Sungai Lae Kombeh itu sendiri sekaligus dijadikan sebagai batas wilayah Dusun Lae Ikan dengan wilayah lainnya.

Dusun Lae Ikan, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan merupakan tempat tinggal dan sekaligus tempat melakukan interaksi sosial di antara warganya. Lingkungan tinggal yang sangat dipengaruhi dengan kondisi lingkungan alam membuat warga dusun banyak mengandalkan hasil bumi berikut pola garapannya. Berdasarkan hasil bumi yang memang telah tersedia di lingkungan Dusun Lae Ikan, para penduduk kemudian mencoba untuk mengambil dan menjadikannya sebagai komoditi penunjang kehidupan ekonominya.

Segi ekonomi yang memang amat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup penduduk, sementara kekayaan alam Dusun Lae Ikan yang menunjang untuk itu, membuat penduduk desa mengambil dan menjualnya ke pasar. Adapun hasil bumi yang diperoleh dari hutan di lingkungan Dusun Lae Ikan di antaranya adalah rotan, dan gambir. Rotan diperoleh dengan cara memasuki hutan secara beramai-ramai atau sendiri sambil membawa peralatan yang diperlukan. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mengambil dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dibawa ke pinggir hutan. Sementara itu, mengenai cara pengambilan gambir, adalah sama caranya dengan pengambilan rotan.

Lingkungan alam Dusun Lae Ikan juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi perkebunan. Untuk itu, beberapa warga

masyarakat kemudian menggunakan pola kepemilikan, yang meskipun belum disahkan melalui surat resmi, namun ada juga yang mengambil lahan sebagai perkebunan rakyat. Cara yang dikembangkan di sana adalah dengan pergi ke lokasi yang sekiranya belum menjadi garapan orang lain. Setelah itu, warga membuka lahan dan membuat patok-patok seadanya. Hal demikian dilakukan terutama oleh warga dusun yang tidak memiliki ekonomi cukup untuk membeli lahan di dekat jalan raya.

Setelah telah tersedia, maka mulailah warga menggunakannya untuk menanam komoditi yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi mereka. Adapun yang banyak ditanam pada lahan seperti itu adalah gambir dan nilam. Pertimbangannya adalah bahwa jenis tanaman seperti itu cocok dengan kondisi tanah, dan harga jual serta peminatnya cukup besar, terutama di wilayah Propinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi). Dua jenis tanaman tersebut telah dikenal oleh warga di Sumatera Utara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena kualitasnya yang cukup baik.

Dalam wilayah Dusun Lae Ikan juga dijumpai warga yang menanam padi. Namun demikian, jenis padi yang ditanam adalah disesuaikan dengan kondisi alamnya yang berbukit-bukit. Kondisi ini kemudian mempersulit untuk pengadaan sarana irigasi. Sementara jenis padi unggul sangat membutuhkan air yang cukup, dan

diwujudkan dalam bentuk irigasi. Berdasarkan hal itu, maka jenis padi yang sesuai dengan kondisi alam Dusun Lae Ikan adalah padi ladang, karena tingkat ketahanannya yang cukup tinggi dalam menghadapi kondisi sulit air, serta tidak diperlukan perawatan yang intensif.

Pemanfaatan alam juga ditujukan pada jenis fauna. Menurut informan bernama Surin Cibero (36 tahun) kepala Desa Jontor, bahwa hal ini pernah dilakukan warga Dusun Lae Ikan pada masa dahulu dalam bentuk pemburuan secara beramai-ramai pada waktu-waktu tertentu. Pembagian hewan buruan didasarkan atas kesepakatan secara adat (Fakfak), di mana bagian terbesar diberikan kepada ketua rombongan. Pemburuan tersebut pada masa kini telah amat jarang dilakukan karena para warga telah menyadari bahwa jenis fauna yang ada di lingkungan alamnya telah dilindungi kelestariannya.

Hal mengenai kondisi alam juga berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat Dusun Lae Ikan. Kondisi berbukit dan tanah yang gembur membuat para warga tidak sembarang untuk mendirikan rumah. Mereka akan mencari tanah yang cukup datar dengan tingkat kekerasan yang memadai. Oleh karena itu, mereka kemudian membuat perumahan di sekitar atau dipinggir jalan raya karena sesuai dengan persyaratan yang mereka inginkan. Kondisi bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumah juga

terkait dengan kondisi alamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 2 di atas, bahwa rumah penduduk Dusun Lae Ikan semuanya menggunakan bahan kayu disebabkan kondisi tanah yang sulit untuk membuat sebuah rumah permanen. Apabila ada warga yang berkeinginan untuk membuat rumah permanen, maka mereka harus menggunakan fondasi yang cukup kuat, yang tentunya memerlukan biaya cukup tinggi, sementara kondisi ekonomi mereka berada pada tingkat keluarga pra sejahtera. Adapun keinginan untuk menggunakan kayu sebagai bahan baku perumahan mereka dapat disebabkan masih banyaknya jenis kayu yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Hal ini kemudian ditambah dengan sulitnya mencari bahan baku seperti semen, pasir dan batu bata.

Fasilitas standar sebuah rumah sehat, di antaranya jamban dan sarana air bersih bagi warga Dusun Lae Ikan tidak begitu menjadi masalah. Kondisi alam yang masih subur dan ditemukannya banyak mata air membuat sebagian warga Dusun mempergunakannya untuk melengkapi sarana air bersih tersebut. Hal demikian kemudian berdampak pada pola ruang rumah mereka. Letak mata air yang terkadang jauh dari rumah mereka, sementara alat untuk mengalirkan air dari sumber ke rumah membutuhkan biaya tinggi, mengakibatkan ketiadaan jamban dan kamar mandi pada tiap rumah di Dusun Lae Ikan. Para warga hanya mengambil air bersih untuk memasak dan minum saja. Lain dari pada itu, mereka

menggunakan mata air untuk keperluan mandi dan mencuci di sumber mata air terdekat.

Dalam pengadaan transportasi, kondisi alam yang berbukit-bukit telah sedikit teratasi, yaitu dengan telah dibangunnya sarana jalan raya antar Propinsi yang telah diperkeras dan diaspal *hotmix*. Hal ini membuat fleksibilitas warga dusun untuk melintasi perbatasan cukup tinggi. Ditambah dengan adanya sarana kendaraan umum yang melayani rute Subulus Salam - Medan yang cukup banyak dengan jam operasi pagi hingga malam hari.

Kebutuhan akan sarana transportasi tersebut memang amat penting karena kedekatan mereka berdasarkan persamaan suku (Batak Fakfak) dan bahasa dengan wilayah Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari tingkat kunjung mengunjungi antar warga perbatasan yang tidak hanya kepentingan cukup penting saja, akan tetapi juga karena hanya ingin berkomunikasi dan berniaga dengan warga di wilayah Sumatera Utara. Kunjungan juga dilakukan warga dusun ke wilayah kota kecamatan Subulussalam. Hal ini dilakukan dalam bentuk kunjungan niaga dan persaudaraan, ataupun hanya sekedar bermain untuk melihat keramaian di ibukota kecamatan Subulussalam.

2. Adaptasi Manusia dengan Lingkungan Sosial

Dalam kehidupan keseharian, setiap manusia dapat dipastikan akan melakukan interaksi sosial baik antar individu, maupun dengan suatu kelompok.⁶ Interaksi tersebut dapat dibatasi berdasarkan lingkungan tempat tinggal manusia sehingga dalam kadar kesehariannya, intensitas interaksi sosial antar manusia lebih banyak dilakukan dalam lingkungan di sekitar tempat tinggal manusia tersebut. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam skala kecil adalah sebuah rumah tangga, dan yang lebih besar lagi dapat berupa sebuah dusun, desa, atau Kecamatan. Berhubungan dengan hal tersebut warga Dusun Lae Ikan mengadakan interaksi sosial dengan sesama warga dusunnya adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan interaksi terhadap warga dusun lainnya.

Adapun alasan warga Dusun Lae Ikan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya adalah karena keterbatasan mereka dalam berbagai hal terutama menyangkut segi ekonomi, budaya. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah dalam hubungan jual beli barang atau komoditi yang dijual warga dusun untuk kemudian hasil dari penjualan tersebut dibelikan berbagai bahan kebutuhan rumah tangganya.

⁶ Astuti et al., (1998: 43) menyatakan bahwa interkasi secara harfiah diartikan sebagai hubungan. Suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak ada kontak komunikasi dan kontak sosial, baik dalam bentuk negatif (konflik) maupun positif (kerjasama).

Hubungan jual beli yang terjadi kemudian akan sangat tergantung antara dua aktor (penjual dan pembeli) yang menjalankan peran tersebut. Dalam hal penjualan barang komoditi yang dihasilkan warga Dusun Lae Ikan seperti nilam dan gambir, peran mereka adalah sebagai penjual yang sangat mengharapkan ada yang membeli komoditi tersebut.⁷ Sasaran penjualan barang tersebut adalah ke pasar yang berada di luar wilayah Dusun Lae Ikan. Berlawanan dengan lokasi penjualan, maka dalam kegiatan pembelian bahan kebutuhan rumah tangga, warga dusun banyak melakukan kegiatan tersebut di dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini disebabkan lokasi pembelian yang dekat serta adanya bahan kebutuhan yang diperlukan warga dusun tersebut. Dampak dari kegiatan semacam ini adalah “surplus” yang diperoleh ibukota Kecamatan Simpang Kiri karena adanya perputaran uang yang cukup cepat sehingga dapat membangkitkan minat penduduk Subulussalam untuk menjual lebih banyak lagi kebutuhan yang diperlukan. Tidak hanya dari warga Dusun Lae Ikan saja, tetapi juga dari warga di wilayah sekitar perbatasan Sumatera Utara karena jarak yang lebih dekat.

⁷ Untuk sasaran penjualan komoditi gambir warga dusun Lae Ikan menjualnya ke wilayah Sumatra Utara karena di daerah tersebut, yaitu para inang atau ibu-ibu menggunakannya sebagai bahan sirih. Selain harga jualnya yang tinggi jika dibandingkan dengan harga jual di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Untuk komoditi nilam juga banyak dipasarkan ke wilayah Sumatra Utara karena harga jualnya yang lebih baik dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Aceh.

Sementara itu, alasan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial juga dapat disebabkan adanya latar belakang budaya yang berlainan antara warga Dusun Lae Ikan dengan warga dusun di sekitarnya dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mayoritas dari suku bangsa Aceh. Menurut informan bernama H.M. Yasin (100 tahun) bahwa masuk dan menetapnya warga Dusun Lae Ikan dapat disebabkan faktor sejarah penetapan wilayah perbatasan antara Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Sumatera Utara. Sebelumnya, lokasi perbatasan tersebut telah ditentukan lebih menjorok ke wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Lokasi tersebut kemudian diralat dalam bentuk perluasan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh hingga ke batas seperti sekarang ini. Adapun wilayah perbatasan pada masa itu masih berupa hutan belantara yang belum berpenghuni. Setelah dibuat pos penjagaan, maka satu persatu warga dari Sumatera Utara berdatangan untuk menjadi warga Dusun Lae Ikan. Pertimbangan mereka untuk datang dan menetap di dusun tersebut disebabkan kondisi lingkungan alam yang amat subur dan sesuai dengan jenis tanaman gambir dan nilam yang memang menjadi komoditi yang handal untuk diperjualbelikan. Setelah berdiam cukup lama, maka sedikit demi sedikit warga Dusun Lae Ikan berakulturasi dengan lingkungan sosial yang ada, baik dalam bidang nilai, norma, hingga dalam bidang acara dan upacara adat.

B. Corak Interaksi Kerjasama dan Konflik

1. Dalam Lingkungan Lokal

Adaptasi terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial yang telah dilakukan oleh warga Dusun Lae Ikan membuktikan adanya keterbukaan masyarakat untuk mau menjadi bagian dalam lingkungan budaya masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun demikian, hal ini bukanlah tanpa diawali dengan masalah yang menimbulkan konflik karena perbedaan budaya.

Memang pada awalnya dibuka dan diresmikan perbatasan untuk kedua kalinya, ada beberapa konflik yang terjadi di daerah perbatasan tersebut. Salah satunya adalah pada waktu pembukaan lahan perkebunan gambir oleh warga wilayah Sumatera Utara di lokasi Dusun Lae Ikan. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah daerah yang mengharuskan adanya kepastian identitas warga tersebut, apakah mereka mau menjadi warga Dusun Lae Ikan dan mau mengikuti adat istiadat Aceh, atau memilih untuk tetap menjadi warga wilayah Sumatera Utara dengan konsekuensi tidak berhak untuk menggarap lahan di Dusun Lae Ikan. Akhirnya warga tersebut mau untuk menjadi warga di Dusun Lae Ikan dan mau berakulturasi dan mengikuti adat istiadat Aceh. Peraturan ini kemudian diikuti oleh warga lainnya yang hendak bermukim di Dusun Lae Ikan, yang dilakukan dengan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, setelah konflik tersebut di atas, hingga sekarang ini masalah perbatasan dan

perbedaan budaya tidak lagi menjadi persoalan penting bagi warga Dusun Lae Ikan.

Berbagai kunjungan antar warga yang dilakukan warga Dusun Lae Ikan membuktikan telah adanya interaksi sosial di antara mereka. Interaksi tersebut kemudian dapat diperinci dengan melihat kepentingan warga terhadap kebutuhan interaksi dimaksud. Adapun kepentingan tersebut didasarkan tidak hanya atas kesamaan suku, agama, dan kepentingan ekonomi dan sosialisasi dalam suatu komunitas.⁸ Hal ini menjadikan warga Dusun Lae Ikan berpandangan dinamis, dan tidak cenderung pada cara pandang sempit seperti etnosentris, ataupun berdasarkan persamaan wilayah yang mengarah pada *eksklusivisme*.

Rasa etnosentris dan kedekatan wilayah mereka dengan Sumatera Utara yang memang tidak dilakukan warga Dusun Lae Ikan membuat hubungan mereka dengan antar suku dan agama tidak menjadi suatu halangan yang berarti. Mereka memang telah menyadari bahwa lingkungan sosial yang terjalin cukup erat sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman hidup mereka. Apalagi mereka yang mayoritas dari suku bangsa Fakkak harus berada dalam

⁸ Komunitas adalah orang yang tinggal bersama dalam satu wilayah karena adanya keterikatan perasaan bangga dan cinta wilayahnya. Dalam komunitas itu sendiri terdapat beberapa etnik dan agama yang saling berbaaur dan berinteraksi antaretnik dan agama (Pelawi, 1997: 73).

wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mayoritas dari suku bangsa Aceh.

Kelanjutan dari interaksi tersebut adalah adanya akulturasi antara suku bangsa fakfak dengan suku bangsa Aceh. Hasil dari akulturasi tersebut adalah dengan diterapkannya adat Aceh dalam adat Batak Fakfak, mulai dari upacara hingga kegiatan keagamaan. Hal yang masih menjadi identitas suku Batak Fak-fak hanyalah penamaan marga dan bahasa daerah yang terkadang masih dijadikan alat komunikasi mereka.

Identitas warga dusun yang dapat dilihat adalah dalam bidang agama yang mayoritas beragama Islam. Kesamaan agama dengan suku bangsa Aceh telah menjadi salah satu faktor untuk mempererat hubungan antara warga dusun yang mayoritas dari suku bangsa Batak Fakfak dengan warga dusun lainnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang mayoritas dari suku bangsa Aceh. Sikap saling undang apabila ada acara keagamaan adalah salah satunya, dan ditambah dengan adanya rasa tolong menolong apabila ada warga dusun yang sedang kesusahan.

Hubungan sosial yang terjadi tidak hanya dilakukan terhadap warga yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, namun dilakukan juga kepada warga yang berada di perbatasan

Sumatera Utara. Agama lain (Kristen)⁹ yang dianut warga di wilayah perbatasan Sumatera Utara tidak menjadi kendala bersosialisasi bagi mereka. Apalagi setelah adanya larangan yang cukup ketat bagi warga di perbatasan Sumatera Utara yang memakan makanan yang diharamkan agama Islam seperti daging anjing dan babi. Mereka juga tidak boleh menampakkan secara terang-terangan kepada warga dusun muslim apabila sedang mengadakan kegiatan tersebut. Peraturan lainnya adalah dalam hal kegiatan upacara, di mana dalam hal pengadaan konsumsi, baik dalam proses memasak ataupun dalam cara penyajiannya telah dibedakan antara warga yang muslim dengan non-muslim.

Rasa solidaritas terhadap warga yang berbeda agama juga tercermin dari pergaulan yang tidak memandang usia. Sebagian anak warga Dusun Lae Ikan yang bersekolah di SD wilayah Sumatera Utara tidak mendapatkan perlakuan semena-mena atas dasar perbedaan agama tersebut. Memang dalam kurikulum SD wilayah Sumatera Utara diajarkan agama Kristen, tetapi murid SD yang beragama Islam warga Dusun Lae Ikan diberikan kebebasan untuk meninggalkan pelajaran agama tersebut.

⁹ Meski memiliki kesamaan suku bangsa dengan warga di perbatasan Sumatra Utara (suku bangsa Fak-fak), tetapi dalam hal agama ada beberapa suku di wilayah Sumatra Utara yang beragama Kristen. Dalam wilayah mereka juga telah dibangun sebuah gereja yang berada dekat dengan mesjid.

Menurut informan bernama Surin Cibero (36 tahun) kepala desa Jontor, bahwa pada mulanya, kurikulum tersebut sempat diperdebatkan bagi warga yang menyekolahkan anak mereka ke SD di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Apalagi banyak dari anak-anak warga dusun yang lebih suka sekolah di sana. Hal ini dimungkinkan karena daerah hunian di perbatasan Sumatera Utara lebih ramai jika dibandingkan perbatasan Dusun Lae Ikan dengan dusun tetangga dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal tersebut membuat anak-anak lebih banyak bermain dan tertarik untuk bersekolah di wilayah perbatasan Propinsi Sumatera Utara. Namun hal tersebut hanya berlangsung pada masa usia sekolah dasar saja, karena menginjak usia untuk memasuki SMP maka mereka bersekolah di dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masalah pilihan sekolah di sana pada saat ini bukan disebabkan adanya perbedaan suku bangsa, tetapi hanya karena kelangkaan teman bermain saja.

Selain kelangkaan teman bermain, adapula yang beranggapan bahwa sarana pendidikan di wilayah Sumatera Utara lebih lengkap, sehingga mereka cenderung bersekolah di wilayah Sumatera Utara. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi warga Dusun Lae Ikan, karena di satu pihak mereka berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sementara mereka juga menginginkan anak mereka untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik. Untuk daerah yang jauh dari perbatasan, dapat saja hal seperti

itu dikesampingkan dan bukan menjadi masalah pokok, tetapi lain halnya dengan daerah perbatasan (baik secara geografis ataupun kultural) karena perasaan kedaerahan dari suku bangsa asal masih menjadi hal yang sensitif dan cenderung untuk mengunggulkan daerahnya sendiri.

Keterkaitan hubungan sosial juga terjadi dalam bentuk hubungan ketetanggaan. Tidak jarang hubungan ini menjadi salah satu bentuk yang secara tidak langsung mempererat tali persaudaraan. Hubungan terbentuk di antaranya dari sikap saling tolong menolong dalam kegiatan keseharian seperti membantu meminjamkan alat rumah tangga pada tetangga yang memerlukannya. Oleh karena posisi dusun di daerah perbatasan, maka mereka menjadikan wilayah perbatasan Sumatera Utara, ataupun dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai tetangga mereka juga, yang wajib diberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan mereka. Kecenderungan ini membuktikan adanya rasa solidaritas cukup tinggi antara warga dusun dengan wilayah tetangganya.

Anak-anak warga Dusun Lae Ikan juga telah diajarkan cara bergaul dengan teman dari suku bangsa lain. Untuk hal itu, tampaknya tidak begitu menjadi masalah besar bagi para orang tua karena sifat anak yang masih polos menjadikan faktor perbedaan

suku bangsa, ataupun agama sebagai pertimbangan sentral dalam hubungan pertemanan mereka.

Menurut informan bernama H. Untung Berutu (85 tahun), bahwa dalam hubungan antar warga Dusun Lae Ikan, hubungan sosial yang terjadi adalah lebih erat lagi karena mereka menyadari posisi geografis wilayah mereka yang berada di perbatasan. Oleh karena itu, apabila ada tetangga yang tengah menghadapi kesulitan maka dengan segera tetangga lainnya akan datang untuk membantu. Kekompakan antar warga dusun juga dibantu dengan intensitas bersilaturahmi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa silaturahmi adalah hal yang biasa dilakukan warga Dusun Lae Ikan. Namun untuk hal itu, jadwal yang ada biasanya tidak dilakukan setiap saat. Mereka biasa datang bersilaturahmi pada saat-saat senggang seperti menjelang shalat Maghrib dan setelah shalat Isya. Ataupun pada hari Jumat karena pada hari itu warga dusun menghentikan kegiatan ekonominya untuk melaksanakan persiapan shalat Jumat. Setelah shalat Jumatpun banyak warga yang meluangkan waktu bersama keluarga ataupun teman dan tetangganya untuk sekedar bercakap-cakap.

Dalam hubungan sosial yang terjadi, beberapa warga ada yang melakukan pernikahan dengan calon yang berada di dalam ataupun di luar dusun. Calon tersebut juga tidak mengkhususkan pada suku bangsa tertentu saja. Dengan adanya kriteria tersebut maka

perkawinan antar suku bangsa membuat kondisi lingkungan sosial Dusun Lae Ikan semakin beragam. Hal perkawinan ini memang telah menjadi pemahaman umum warga Dusun Lae Ikan untuk mengawini tidak dalam suku bangsanya saja karena mereka yang mayoritas dari suku bangsa Batak Fakfak telah mendiami wilayah yang sekarang berada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pelaksanaan dari kegiatan perkawinan tersebut, sesuai dengan sikap keterbukaan untuk menerima suku bangsa lain, adalah dengan tidak merugikan adat perkawinan salah satu pihak. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka sebelum dilaksanakan perkawinan, kedua keluarga calon mempelai mengadakan musyawarah untuk menentukan adat mana yang akan digunakan dalam upacara perkawinan nantinya. Ataupun, jika kedua belah pihak berasal dari keluarga yang berada, maka dapat dilaksanakan perkawinan dengan adat yang berbeda. Namun demikian, hal terakhir ini hanya menjadi peraturan saja karena taraf ekonomi warga Dusun Lae Ikan yang masih berada dalam kelompok keluarga pra sejahtera membuat pelaksanaan acara tersebut amat sulit dilakukan.

Meski adat perkawinan warga Dusun Lae Ikan telah mengalami proses keterbukaan, namun dalam masalah perbedaan agama masih sangat sensitif. Dampak dari kesulitan untuk mengadakan perkawinan yang berbeda agama adalah dari tidak adanya warga Dusun Lae Ikan yang melaksanakan perkawinan

tersebut. Mungkin karena dalam hal ini seseorang harus mengorbankan hubungan kekerabatan asalnya. Masalahnya perkawinan antar orang yang berbeda agama biasanya berlanjut kepada pindah agama dari salah seorang pasangan tersebut. Dalam hal itu, menurut informan bernama Sehat Berutu (42 tahun) bahwa warga Dusun Lae Ikan sudah dipastikan melaksanakan perkawinannya dengan calon yang seagama. Ataupun apabila perbedaan agama ditemukan, maka hanya terjadi dalam masa pemilihan jodoh saja, namun dengan syarat bahwa sang calon telah menyatakan kesediaannya untuk pindah agama lebih dahulu sebelum dilangsungkan perkawinan. Masyarakat Dusun Lae Ikan amat mengikuti akan peraturan atau adat tersebut sehingga tidak ditemukan adanya kasus perbedaan agama tersebut.

2. Dalam Lingkup Nasional

Corak dan pola warga Dusun Lae Ikan juga dapat ditinjau dari skala nasional. Penetapan Lae Ikan sebagai dusun dalam wilayah Desa Jontor Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Selatan adalah bentuk dari pengesahan wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia setelah sempat mengalami proses tawar menawar perihal garis batas antara wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Tindak lanjut dari pengesahan wilayah tersebut adalah diberlakukannya berbagai macam aturan terutama yang menyangkut faktor wilayah mereka yang telah masuk

dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian nampak dengan diberlakukannya kewajiban warga Dusun Lae Ikan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kewajiban ini dilaksanakan sepenuh hati karena mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari penduduk Indonesia yang harus didata identitasnya.

Warga Dusun Lae Ikan dalam menanggapi peraturan pemerintah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian masalah warga, seperti sengketa tanah, dan keamanan dusun. Warga yang mengalami masalah keamanan akan segera dapat diselesaikan oleh LMD dan LKMD Dusun Lae Ikan. Sementara mengenai sengketa tanah yang berkepanjangan akan diselesaikan menurut aturan pemerintah.

Meski peraturan pemerintah menjadi pedoman bagi warga, namun mereka juga tidak melupakan peraturan adat untuk menyelesaikan masalah-masalah warga. Malahan setiap konflik yang muncul terlebih dahulu akan diselesaikan oleh orang yang dituakan warga. Namun demikian, apabila masih tidak dapat diselesaikan, maka masalah diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hal lain yang berkenaan dengan lingkup nasional adalah dalam segi bahasa. Penggunaan Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu bentuk perilaku warga dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia

memang kerap dijadikan sebagai alat komunikasi karena skala penggunaan bahasa Indonesia lebih luas dari bahasa suku bangsa mereka. Oleh karena itu, meskipun di antara tetangga telah mengenai betul kesukuannya, namun mereka kerap menggunakan bahasa Indonesia, tentunya dengan logat atau dialek Fakfak, dan sesekali menggunakan bahasa daerah apabila mereka tidak menemukan kata yang tepat untuk mengutarakan maksud mereka.

Dalam kegiatan hari-hari besar nasional seperti tanggal 17 Agustus, 1 Oktober dan 10 Nopember, warga Dusun Lae Ikan turut menaikkan bendera merah putih. Mereka melakukan itu tanpa paksaan karena sadar bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu, diterapkan oleh warga Dusun Lae Ikan dalam masalah pergaulan antar suku. Untuk hal itu, mereka amat memperhatikan arti perbedaan suku yang merupakan salah satu pemicu paling mudah untuk menimbulkan sebuah sengketa. Dengan adanya pemahaman seperti itu, warga Dusun Lae Ikan kemudian berbaur dengan suku-suku lainnya, tidak hanya dengan suku Aceh saja, tetapi juga dengan suku-suku lainnya baik dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan, seperti Aneuk Jamee, Kluet dan Singkil, tetapi juga di luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan seperti suku bangsa Aceh, Jawa, Sunda, dan sebagainya.

Mengenai pembauran antara suku berlainan yang dilakukan oleh warga Dusun Lae Ikan tanpa konflik terlebih dahulu. Hal ini menjadi pertanda bahwa warga Dusun Lae Ikan adalah warga yang mudah untuk bersosialisasi dengan suku lainnya. Mereka menyadari bahwa posisi wilayah mereka sangat strategis, yakni di perbatasan Propinsi, yang sekaligus menjadi batas wilayah suku bangsa (Aceh dan Batak). Oleh karena dari pemahaman akan letak wilayah tersebut mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal mana yang terjadi terhadap warga Dusun Lae Ikan merupakan salah satu contoh dari “kebhinekaan” kesukuan yang harus bersatu dalam konteks kewilayahan yaitu Indonesia.

C. Analisis

1. Faktor Penghambat

Perbatasan yang didasarkan atas kebudayaan-kebudayaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia menurut Sadilah (1997: 40) pada hakekatnya adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. selain itu, penyebab perbedaan adalah seperti yang diungkapkan oleh Royce (Pelly, 1989), yaitu melalui tiga faktor yang menentukan hubungan antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk, yaitu kekuasaan (*power*), persepsi (*perception*), dan tujuan (*purpose*). Di antara ketiga faktor tersebut,

kekuasaan adalah yang paling dominan dalam proses pembauran (asimilasi dan akulturasi) sehingga suatu suku bangsa dapat menjadi pedoman bagi terciptanya hubungan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya.

Bruner (Pelly, 1989) menjelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan yang dimaksud terbagi dalam tiga faktor, yaitu faktor demografis, politis, dan budaya lokal. Untuk menjalankan praktik kekuasaan, maka jalinan awal untuk membuka hubungan antara "penguasa" dengan yang dikuasai tidak jarang menimbulkan pertikaian karena adanya ketiga faktor tersebut. Pertikaian kemudian menjadi jelas apabila adanya campur tangan dari pihak ketiga, yang dalam hal ini pihak terkait dalam suatu negara yang turut menentukan batasan-batasan dari ketiga faktor tersebut, yang dapat saja tidak sesuai dengan keinginan masing-masing suku bangsa yang terkait. Berdasarkan perbedaan tersebut itulah, dijumpai kemajemukan tiap-tiap suku bangsa yang turut mempengaruhi interaksi antar suku bangsa di Indonesia. Tidak jarang dari perbedaan tersebut ditemukan konflik antar suku bangsa yang mengakibatkan pertikaian-pertikaian, baik dalam skala kecil ataupun luas.

Pertikaian yang mungkin terjadi dapat mengacu pada adanya asumsi bahwa tiap suku bangsa mampu mempertahankan kebudayaannya dengan cara tidak mengacuhkan suku bangsa lainnya baik secara demografis, politis, ataupun budaya lokal. Hal ini

berkembang menjadi rasa etnosentrisme tiap suku bangsa, dan akan lebih buruk lagi bila tiap suku bangsa meremehkan atau memandang rendah suku bangsa lainnya. Ketidakacuhan tersebut ditambah lagi dengan kurangnya intensitas interaksi antar suku bangsa, terutama pada awal-awal dibukanya daerah-daerah yang menjadi batas lingkungan budaya masing-masing suku bangsa yang masih terisolasi. Isolasi yang dimaksud, adalah seperti yang dikatakan oleh Barth (1988: 10), yaitu isolasi geografis dan isolasi sosial. Isolasi geografis dapat berupa batasan sungai, gunung, atau rawa-rawa tanpa adanya sarana fisik yang menghubungkan antara kedua wilayah etnis tersebut. Sementara itu, isolasi sosial dapat digambarkan sebagai batasan sosialisasi antara dua suku bangsa sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan suku bangsa lainnya. Dengan adanya dua isolasi tersebut, lebih lanjut dikatakan Barth bahwa batasan etnis sebenarnya tidaklah penting karena mereka pada dasarnya memang secara alamiah akan membatasi dirinya karena adanya perbedaan mendasar dari tiap etnis, seperti perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial, dan perbedaan bahasa.

Kondisi yang telah dikatakan Barth di atas kemudian dimunculkan dalam bentuk hambatan yang terjadi dalam masa awal proses akulturasi dan sosialisasi dalam wilayah Dusun Lae Ikan, meskipun dalam kadar yang rendah saja. Adapun hambatan tersebut di antaranya adalah seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu

disaat masa-masa pertama pengesahan wilayah di perbatasan Sumatera Utara dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga membentuk Dusun Lae Ikan. Isolasi geografis nampak dalam masa-masa pembukaan perbatasan tersebut, karena daerah yang kini menjadi Dusun Lae Ikan pada awalnya adalah hutan belantara yang tidak berpenghuni. Para warga yang pertama tinggal di Dusun Lae Ikan, yang sebagian besar adalah dari etnis Fakkak pada awalnya merasa kesulitan untuk melakukan sosialisasi dengan daerah perbatasan tersebut. Mereka merasa bahwa perbatasan wilayah adalah hal yang tidak begitu penting, dan mereka mengabaikannya dengan cara melakukan usaha di wilayah Propinsi D.I. Aceh, sementara mereka sendiri tetap tinggal di wilayah Sumatera Utara. Hal ini kemudian mengakibatkan konflik perbatasan, namun telah dapat diselesaikan, baik secara adat maupun secara administratif.

Hambatan dalam bentuk penentuan batas wilayah tersebut menjelaskan pendapat dari Bruner di atas, yaitu tentang faktor politis, yang kemudian berkembang menjadi konflik antar kepentingan penggunaan lahan/wilayah untuk melakukan usaha. Achdiat (dalam Sadilah, 1997:43) menjelaskan lebih lanjut bahwa kesempatan untuk melakukan kerjasama, kompetisi, ataupun konflik antar suku bangsa salah satunya adalah dalam memperebutkan sumber daya (alam) yang terbatas dan berharga di antara golongan suku bangsa. Memang apabila dilihat dari kondisi geografis daerah perbatasan tersebut memang mengandung banyak sumber daya alam

yang mampu untuk menambah pendapatan suku bangsa yang menempatinya.

Hambatan berupa isolasi sosial, atau kultural, dapat juga menjadi kendala karena dalam wilayah perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh, selain batasan administratif ditemukan pula batasan suku bangsa sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan identitas suku bangsanya sedapat mungkin agar jangan ada yang menggunakannya. Hambatan ini dapat saja berkembang apabila salah satu etnik tidak dapat mempertahankan identitas suku bangsanya secara kuat sehingga menimbulkan kegagalan atau kekaburan.¹⁰ Lebih lanjut lagi apabila mereka telah menetapkan bahwa merekalah sebenarnya mereka adalah suku bangsa asli daerah tersebut, dan akan dilakukan dengan cara mempertahankan wilayah mereka sedapat mungkin. Hal ini tentunya akan menyulitkan proses integrasi dalam wilayah perbatasan tersebut.

Namun demikian, kekaburan tersebut tidak menjadi persoalan utama bagi hambatan yang terjadi pada masa awal interaksi antara suku bangsa yang ada di perbatasan Dusun Lae Ikan dengan dusun yang ada di daerah Propinsi Sumatera Utara karena kedua belah pihak dalam wilayah perbatasan bukan berasal dari suku

¹⁰ Barth (1988: 31) memberi contoh tentang suku Baluch yang menyatakan dirinya "pathan asli" karena mereka telah hidup di perkampungan kelana dan banyak berbaur dengan etnik lain. Mereka merasa putus asa dan menyatakan dirinya sebagai suku "pathan asli".

bangsa nomaden, yang cenderung menyerap unsur-unsur kebudayaan yang ditemuinya. Apalagi setelah ditemukan kenyataan bahwa warga Dusun Lae Ikan masih memiliki hubungan suku bangsa yang berada dalam wilayah Sumatera Utara, yaitu suku bangsa Batak Fak-fak.

Masalahnya kini adalah hubungan warga Dusun Lae Ikan dengan dusun tetangga dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mayoritas berasal dari suku bangsa Aceh Singkil. Dalam masa awal proses interaksi dan integrasi, adalah umum terjadi adanya konflik yang disebabkan adanya perbedaan kebudayaan pada masing-masing suku bangsa. Apalagi warga Dusun Lae Ikan pada mulanya berasal dari Sumatera Utara yang pindah dan menetap di Dusun Lae Ikan. Tidak jarang awal masa interaksi dihambat oleh adanya persepsi negatif antara kedua belah pihak, yang juga umum terjadi dalam setiap pergaulan suku bangsa di Indonesia.¹¹

Memang dalam hasil penelitian tidak ditemukan adanya persepsi negatif dari kedua suku bangsa dalam perbatasan tersebut, namun terlihat pula adanya konflik yang disebabkan sejumlah murid

¹¹ Persepsi negatif mungkin dapat dicontohkan dalam pergaulan suku bangsa Indonesia, yaitu dalam pemberian "cap" yang stereotipe antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Saadilah (1997: 42) mencontohkan bahwa tidak jarang "cap" *pencilok* dan *Padang Bengkulu* ditujukan kepada orang Minangkabau, kasar pada orang Bugis, lamban kepada orang Melayu dan lain-lain. Sebutan untuk hal negatif di masyarakat Aceh sendiri adalah *pungo* (gila) karena latarbelakang pembunuhan khas Aceh waktu jaman Belanda (Sufi, 1997: 4)

SD dari Dusun Lae Ikan yang lebih suka bersekolah di daerah Sumatera Utara. Hal ini menjadi dilema bagi warga Dusun Lae Ikan karena di satu pihak mereka harus beradaptasi dengan suku bangsa asli, sedangkan di lain pihak mereka menginginkan mutu pendidikan anak agar lebih baik. Padahal pada dasarnya warga Dusun Lae Ikan tidak menginginkan cap "exclusive, extreme, daerahisme" diterapkan kepada mereka hanya karena mereka berasal dari suku bangsa yang berasal dari Sumatera Utara. Konflik yang terjadi tentu akan ada akhirnya, dan hal itu telah ditemukan oleh warga Dusun Lae Ikan sehingga mereka kini dapat bebas berkomunikasi dengan suku bangsa asli Propinsi Daerah Istimewa Aceh. pergantian antara konflik perbatasan dengan kerjasama tentunya memerlukan faktor yang mendukung terciptanya kerjasama tersebut.

2. Faktor Pendukung

Pada saat ini, masyarakat perbatasan di Dusun lae Ikan dapat bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan dusun lainnya secara bebas, baik dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh maupun dengan warga dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Indikasi untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut dapat dilihat dari faktor sosial budaya dan fisik yang saat ini telah mampu mengubah konflik menjadi kerjasama. Sucipto dkk. (1996: 99) menyatakan bahwa faktor sosial budaya yang dapat menjalin

kerjasama dalam hubungan antar suku bangsa tercipta setelah adanya mekanisme yang mengatur hubungan sosial yang meliputi hubungan antar individu, individu dalam kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Wujud dari mekanisme adalah seperangkat nilai-nilai yang sama dalam setiap suku bangsa seperti sikap saling hormat-menghormati, ramah tamah, gotong royong, tenggang rasa, musyawarah dan mufakat, rasa setia kawan, toleransi, memperhatikan, jujur, adil dan bijaksana. Nilai-nilai yang sama dalam lokasi penelitian diterapkan dalam kerangka *basic personality structure*, sehingga meskipun dalam kehidupan sehari-hari tetap mengacu pada kehidupan suku bangsanya tetapi tidak mengganggu komunikasi antar suku bangsa. Gagasan untuk melakukan aktivitas berdasarkan kerangka *basic personality structure* akan lebih berhasil bila para pendukung kebudayaan memiliki sikap yang *co-figurative*, yaitu mengutamakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengacu pada sistem budaya¹² apapun yang dapat diandalkan.

¹² Esten (1982) menyatakan bahwa sistem budaya Indonesia adalah sistem budaya yang sedang berproses mengarah kepada sistem budaya yang mengacu kepada nilai-nilai baru yang berasal dari "barat" dan meski secara diam-diam berkembang kepada diterimanya subkultur setelah melalui proses seleksi. Bachtiar (1978) kemudian membagi sistem budaya Indonesia menjadi sistem budaya etnis pribumi, sistem budaya yang dibawa oleh agama-agama besar, dan sistem budaya Indonesia. Kesemua sistem budaya tersebut pada hakikatnya tidak utuh karena adanya proses asimilasi, akulturasi, dan konflik.

Berdasarkan pernyataan dari Sucipto dkk di atas, maka apa yang menjadi faktor pendukung dalam wujud persamaan nilai sosial dan budaya ini terdapat pula dalam kehidupan adat istiadat dari kedua belah pihak. Ditambah lagi dengan adanya sifat tidak menutup diri interaksi dengan suku bangsa lain. Hal ini terlihat dari perpindahan penduduk suku bangsa Batak Fakkak ke daerah yang sekarang menjadi Dusun Lae Ikan, yang membuktikan bahwa mereka mau membuka hubungan dengan suku bangsa lainnya. Sementara itu dari suku bangsa asli (Aceh) adalah sama halnya dengan suku bangsa lain yang juga suka berkomunikasi dan bersosialisasi. Hal ini telah terlihat dalam lintasan sejarah Aceh yang dipenuhi dengan hubungan dagang dan suku bangsa lain. Agama Islam yang berasal dari tanah Arab dan kini dianut oleh mayoritas suku bangsa Aceh juga membuktikan akan keterbukaan suku bangsa Aceh terhadap masalah keagamaan.

Toleransi antar umat beragama juga telah ada dalam diri warga perbatasan, sehingga apa yang selama ini ditakutkan dari perbedaan agama, yaitu konflik antar agama, dapat diredam dan digantikan dengan rasa saling tolong menolong antar umat beragama. Contohnya adalah dengan memahami dan tidak menyinggung masalah haram dan halal di antara kedua agama (Islam dan Kristen).

Faktor budaya lain yang menjadi faktor pendukung sosialisasi masyarakat perbatasan adalah masih kuatnya peranan

ketua adat atau sesepuh yang menjadi penengah dalam berbagai masalah kemasyarakatan. Para sesepuh ini adalah orang pertama bagi penyelesaian masalah warganya sebelum beranjak ke lembaga resmi pemerintah (pihak keamanan atau kejaksaan). Apabila telah diselesaikan oleh sesepuh ini, maka masalah tersebut tidak akan diteruskan kepada lembaga resmi pemerintah. Meski termasuk dalam kategori "tua", namun gagasan para sesepuh ini bukan mengacu pada *post-configurative*, yang selalu memuja-muja kejayaan masa lalu dan berusaha mempertahankan kebudayaan lama dan asli. Para sesepuh di daerah perbatasan amat memperhatikan arti sebuah kerjasama antar suku bangsa sehingga proses sosialisasi dapat berjalan dengan lancar di daerah perbatasan.

Faktor fisik yang juga turut mendorong terciptanya hubungan kerjasama di daerah perbatasan ini dapat berupa pembangunan sarana-sarana sosial yang mampu menyerap anggota masyarakat dari berbagai golongan untuk bertemu dan saling berkomunikasi. Pembangunan sarana fisik yang dimaksud adalah seperti sekolah dan Mesjid. Sementara itu sarana transportasi juga turut menjadi jembatan untuk memperlancar komunikasi antar warga, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II di atas, telah dibangun secara permanen.

Dengan adanya pembangunan sarana fisik tersebut, dan diperlukan oleh masyarakat, maka mau tidak mau masyarakat akan

bertemu satu dengan yang lainnya dan berkomunikasi paling kurang membicarakan masalah mereka dalam perjalanan, atau ruangan. Selibuhnya apabila berkelanjutan dan mendapat tanggapan baik dari kedua belah pihak maka akan tercipta jalinan hubungan yang akan semakin panjang dan berdampak baik bagi warga di daerah perbatasan.

BAB
5

PENUTUP

Pola hubungan antargolongan suku bangsa yang terjadi di Dusun Lae Ikan khususnya dan Desa Jontor pada umumnya cenderung diwarnai oleh adanya kebudayaan dominan, yaitu kebudayaan Batak Fak-fak. Hal ini tampak dari beberapa aspek budaya yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh pun demikian tidak berarti setiap interaksi sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat di arena umum lokal selalu ditonjolkan kebudayaan dominan tersebut. Hal ini tergantung dari setiap individu yang terlibat dalam interaksi sosial itu berbeda suku bangsanya.

Walaupun pola hubungan antargolongan suku bangsa di Dusun Lae Ikan yang terjadi di arena umum lokal diwarnai oleh adanya pengaruh kebudayaan dominan, namun kecenderungan pembauran mudah dan sudah dilaksanakan. Frederick Barth (1969) mengatakan bahwa batas-batas suku bangsa itu tetap ada, walaupun

telah terjadi proses silang penetrasi dan pengaburan batas-batas kebudayaan di antara kedua golongan suku bangsa yang berbeda.

Pola hubungan antargolongan suku bangsa yang terjadi di Dusun Lae Ikan pada dasarnya juga telah melahirkan stereotip dan prasangka antargolongan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, hubungan-hubungan kerjasama dan hubungan sosial yang baik di antara warga golongan suku bangsa tertentu yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun sumber konflik yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan terjadi kerawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang menyangkut kehidupan beragama. Hal ini disebabkan adanya dua pemeluk agama yang ada di daerah perbatasan, yaitu Islam dan Kristen. Karenanya, apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut pemecahannya perlu melibatkan keberadaan tokoh agama dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Renggo dan Sigit Widiyanto

1998 *Budaya Masyarakat Perbatasan: Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini.

Bachtiar, Harsya W.

1978 "Birokrasi dan Kebudayaan", dalam *Analisis Kebudayaan*, No. 2 Tahun II.

Barth, Frederick.

1988 *Kelompok etnik dan Batasannya*, Jakarta: UI Press.

Esten, Mursal

1982 *Sastra Indonesia dan Tradisi Subkultur*, Padang: Angkasa Raya.

Koentjaraningrat

1980 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

1985 "Metode Wawancara". Koentjaraningrat (ed.). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Moleong, Lexy. J.

1989 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Pelly, Usman.

1989 *Hubungan Antara kelompok etnis: Beberapa Kerangka Teoritis dalam Hubungan Kasus Kota Medan dalam Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Depdikbud.

Sadilah, Emilia et.al.

1997 *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Depdikbud.

Sucipto, Toto et.al.

1996 *Integrasi Nasional dalam Hubungan Antar Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional: Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kotamadya Bandung*, Jakarta: Depdikbud.

Sufi, Rusdi

1997 "Pembunuhan Khas Aceh dan Sebutan Aceh Pungo", dalam *Serambi Indonesia* tanggal 5 Desember 1997.

Suparlan, Parsadi.

1989 *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*, Jakarta: Depdikbud.

Taryati dan Dwi Ratna Nurhajarini

1999 *Budaya Masyarakat di Lingkungan Kawasan Industri Kasus Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud.

Perpustakaan
Sejarah dan